

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS SOSIAL



2021 - 2026

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	<b>I-1</b>
1.2 Landasan Hukum.....	<b>I-4</b>
1.3 Maksud dan Tujuan.....	<b>I-8</b>
1.4 Sistematika Penulisan .....	<b>I-9</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL</b> .....	<b>II-13</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	<b>II-13</b>
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial.....	<b>II-15</b>
2.3 Kinerja Pelayanan .....	<b>II-23</b>
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	<b>II-34</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL</b> .....	<b>III-37</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD .....	<b>III-37</b>
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	<b>III-39</b>
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....	<b>III-42</b>
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	<b>III-47</b>
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	<b>III-49</b>
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>IV-53</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	<b>IV-53</b>
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	<b>IV-56</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>V-58</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>VI-61</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL</b> .....	<b>VII-109</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>VIII-112</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, SWT, bahwa Penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Sumatera Barat telah selesai.

Rencana Strategik (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2021 – 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, Tujuan dan Sasaran serta program serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasamadan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Pada Penyusunan Rentra ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2021 – 2026 Dinas Sosial Sumatera Barat, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 29 Agustus 2021  
Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat



Jumardi, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19670817 200003 1 006

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Sosial wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, selain menyesuaikan kepada RPJMD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan

mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Di samping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Tahap awal persiapan penyusunan, adalah membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang dilakukan penetapan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor: 954/460/SK/PROG/DINSOS-2021 tanggal 91 Agustus 2021 tentang Perubahan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Setelah tim terbentuk maka dilakukan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah melalui rapat internal tim dan juga disusun agenda kerja tim penyusun Renstra. Selain itu juga dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup (a) analisis gambaran pelayanan OPD, (b) analisis permasalahan, (c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, (d) analisis isu strategis, (e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, (f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, (g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas Sosial.

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra telah diverifikasi oleh BAPPEDA untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Kemudian BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

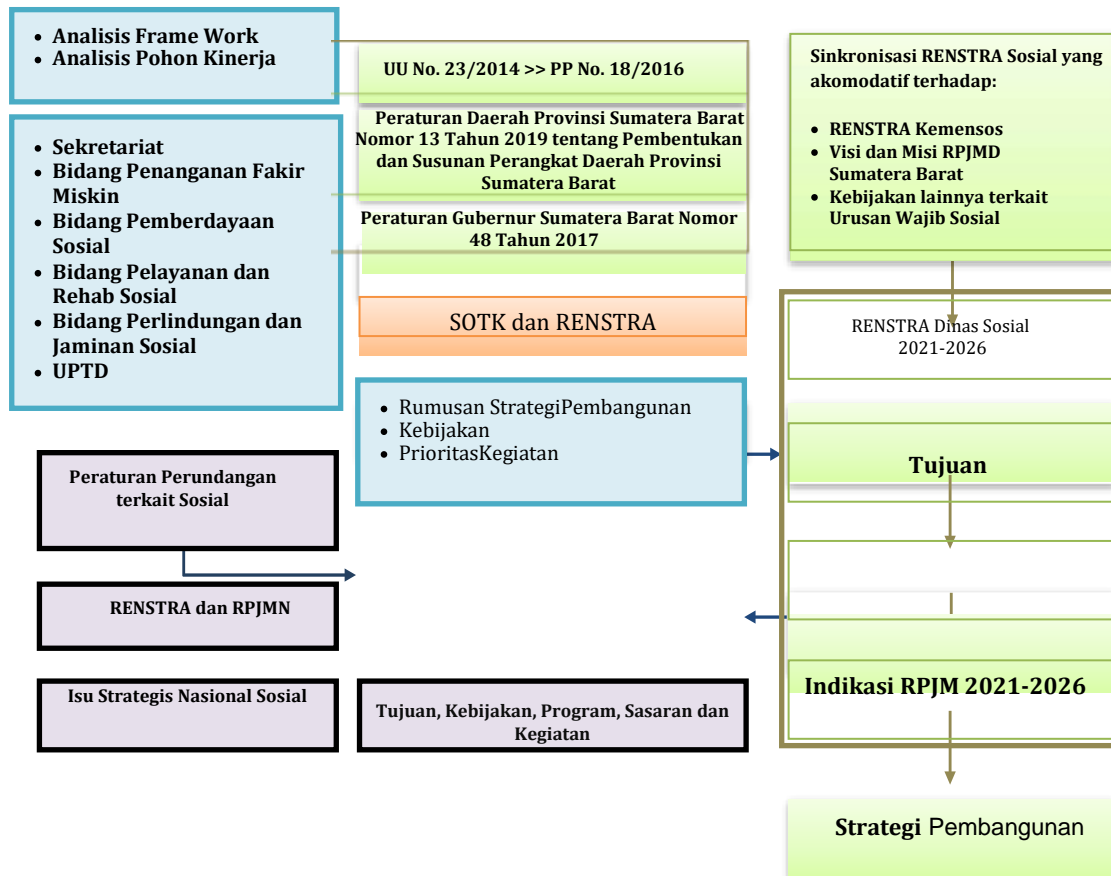
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial setiap tahunnya.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka perlu dibuat Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Dalam lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dokumen Renstra diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sebagai bagian dari skenario pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan, dapat menjadi acuan bagi penyusunan program-program sektor bidang sosial, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja Dinas Sosial).

Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan sinkronisasi antara kebijakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Renstra dan rumusan program juga sedapat mungkin mencerminkan kebutuhan program setiap unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi kebijakan dan program setiap bidang dan UPTD menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021- 2026. Secara skematis, alur proses penyusunan Revisi Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada skema.



**Gambar 1.1** Skema Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseasi* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang



- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  10. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nonor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nehara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

- Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  24. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
  25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
  26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  27. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;
  28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun tanggal 05 Februari 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagai dokumen Perencanaan bagi Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Sosial khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan menjadi pedoman dalam rangka kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan juga Evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata kelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2021-2026;
- b. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021-2026;
- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Rencana Kerja Tahunan); dan
- d. Sebagai tolak ukur dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Akhir Masa Jabatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menggambarkan struktur organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan di Sumatera Barat khususnya pada urusan wajib sosial. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan didapatkan hasil kajian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di waktu yang akan datang. Bab II terdiri dari :

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon 3 Dinas Sosial. Uraian tentang struktur Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil

### 2.2. Sumber Daya Yang Dimiliki

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, kebutuhan akan SDM dan asset/modal

### 2.3 Kinerja Pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini menunjukkan gambaran data Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya..

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kemensos dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan

peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada lima tahun mendatang.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

Pada bab ini terdapat isu-isu bersifat strategis yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas jangka menengah ke depan. Penggambaran isu dimulai dari isu pengembangan dan potensi daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, isu yang dibahas terkait pembangunan kesejahteraan social seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan. Bab III terdiri dari :

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan social beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial yang terkait visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis Dinas Sosial

#### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan kesejahteraan sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial atau Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan kesejahteraan sosial ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan kesejahteraan sosial ditinjau dari:

1. Gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
  2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial;
  3. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sosial yang terencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengupas langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Strategi pembangunan ini meliputi kebijakan, program dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, indikator kinerja yang terukur untuk target pencapaiannya.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat Indikator Kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VII terdiri dari :

7.1 Indikator Kinerja SKPD

7.2 Indikator Kinerja Utama SKPD

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.



## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.**

### **2.1.1. Tugas Dinas Sosial**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi unsur pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

### **2.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

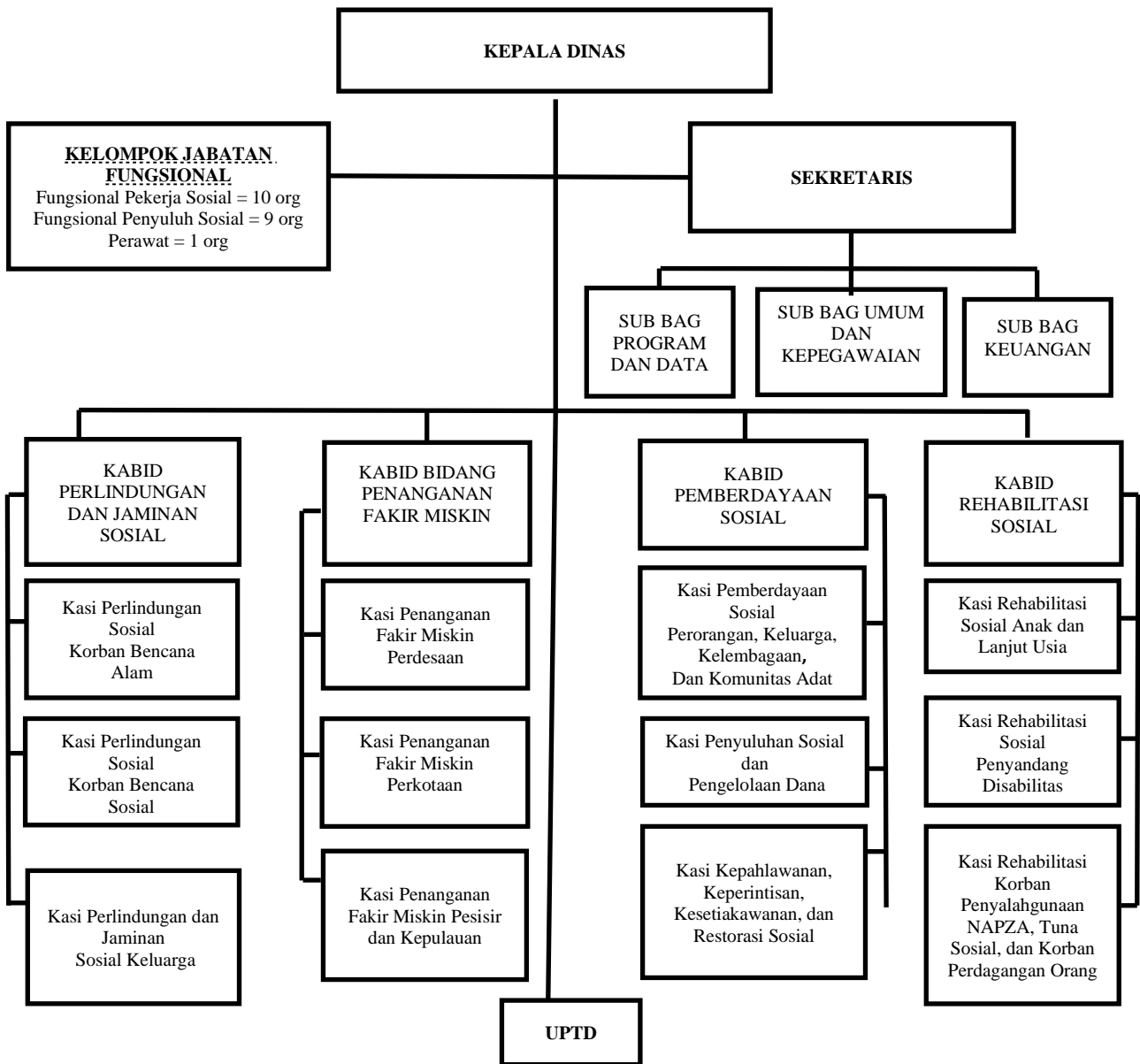
Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub. Bagian Keuangan;
  - Sub. Bagian Program;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial.
  - Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil,;
  - Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial;
  - Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
  - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
  - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan;
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial.
  - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
  - Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - Seksi Perindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;

#### 2.1.3. Bagan dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Bagan dan Struktur Organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggambarkan Jaringan Kerja antar Bagian beserta nama Penanggung Jawab setiap Bagian tersebut. Adapun Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



## 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh personil sebanyak 289 orang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris/ Kepala Bidang , Kepala UPTD, Kepala Seksi/Subbag, Fungsional dan Staf (PNS dan Non PNS) seperti tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.1.** Gambaran Jumlah pegawai Dinas Sosial dan sebarannya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

REKAPITULASI PNS, PTT, dan HONORER, NonHonorer  
MENURUT GOLONGAN, PENDIDIKAN, DAN JABATAN  
DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA BARAT  
PER APRIL TAHUN ANGGARAN 2021

<b>P N S</b>																					Ket.
NO	Jenis Kelamin	GOLONGAN				PENDIDIKAN								JABATAN							
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3	Es I	Es II	Es III	Es IV	JFT	JFU			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	L - 110	5	32	61	12	8	11	30	2	52	7	-	-	1	2	5	19	10	73		
2	P - 85	3	14	62	6	5	2	22	3	49	4	-	-	-	1	2	13	8	61		
<b>Total</b>		8	46	123	18	13	13	52	5	101	11	-	-	1	3	7	32	18	134		
		195				195													195		

NO	Jenis Kelamin	P T T - 6 orang.						HONORER - 86 orang.						Non KONTRAK - 2 orang.						
		SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	D4-S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	L - 58	-	2	1	-	-	-	5	2	32	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-
2	P - 36	1	-	-	-	2	-	5	3	11	3	9	-	-	-	-	-	2	-	-
<b>TOTAL - 94</b>		1	2	1	-	2	-	10	5	43	7	20	1	-	-	-	-	2	-	-

**Tabel. 2.2** Usulan Kebutuhan Analisa Jabatan yang harus disediakan:

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Sosial Madya	S.1 Ilmu Kessos	1	Dinas Sosial
2	Analisis SDM Aparatur	S.1 Ilmu Manajemen SDM/ Komunikasi/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	1	Sekretariat (UK)
3	Pengelola Teknologi Informasi	D.III Komputer/ Teknik Informatika/ Komputer	1	Sekretariat (UK)
4	Sekretaris (Pelaksana)	D.III Ilmu Sekretaris/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	1	Sekretaris (UK)

5	Pengadministrasian Umum	SMK Ilmu Administrasi/ Manajemen Perkantoran SLTA semua jurusan	14	Sekretariat (UK) Bid.Linjamsos Bid. Rehsos Bid. Dayasos Bid. Fakir Miskin PSBG Harapan Ibu PSAABR Budi Utama PSTW Sabai Nan Aluih PSAA Tri Murni PSTW Kasih Sayang Ibu
	Petugas Keamanan	SMK. Ilmu Semi Militer SLTA. Sederajat / Semua Jurusan	1	PSTW Sabai Nan Aluih
6	Verifikator Keuangan	D.III Akuntansi/ Manajemen Keuangan/ ADM Keuangan	1	Sekretariat (Keuangan)
7	Pengadministrasian Keuangan	SMK Akuntansi	1	Sekretariat (Keuangan)
	Pengelola Keuangan	D.III Akuntansi/ Manajemen Keuangan/ ADM Keuangan	1	PSBN Tuah Sakato
8	Pengolah Data	D.III Ilmu Komputer/ Teknik Informatika & Komputer/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	1	Sekretariat (Program)
9	Konselor	S.1 Ilmu Bimb. Konseling/ Kesehatan Masyarakat/ Psikologi Pendidikan	2	Bid. Linjamsos PSKW Andam Dewi
10	Analisis Bencana	S.1 Ilmu Teknik Geologi/ Pengelolaan Bencana Alam Kesehatan Lingkungan/ SDM	1	Bid. Linjamsos
11	Analisis Pelayanan Sosial	S.1 Kessos/ Sosiologi /Psikologi Masyarakat	3	Bid. Linjamsos Bid. Fakir Miskin
12	Pengelola Perlindungan Sosial	D.III Kessos/ ADM Negara/ ADM Publik	1	Bid. Linjamsos

13	Pengemudi	SMK Ilmu Teknik Otomotif SLTA semua jurusan	1	Bid. Linjamsos
14	Analisis Rehabilitasi Sosial	D.IV/S.1 Kessos/ Sosiologi/ Psikologi Masyarakat	2	Bid. Rehsos
15	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	D.III Ilmu Kessos/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	1	Bid. Dayasos
16	Pengelola Kesejahteraan Sosial	D.III Ilmu Kessos/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	2	Bid. Dayasos Bid. Fakir Miskin
17	Analisis Kesejahteraan Sosial	S.1 Kessos/ Sosiologi /Psikologi Masyarakat	1	Bid. Fakir Miskin
18	Pekerja Sosial Muda	S.1 Pekerja Sosial	7	PSBG Harapan Ibu PSAABR Budi Utama PSTW Sabai Nan Aluih PSAA Tri Murni PSKW Andam Dewi
19	Pekerja Sosial Lanjutan	D.III Pekerja Sosial	7	PSBG Harapan Ibu PSBN Tuah Sakato PSAABR Budi Utama PSTW Sabai Nan Aluih PSTW Kasih Sayang Ibu PSKW Andam Dewi
20	Pekerja Sosial Pertama	S.1 Pekerja Sosial	9	PSBG Harapan Ibu PSBN Tuah Sakato PSAABR Budi Utama PSKW Andam Dewi PSTW Sabai Nan Aluih PSAA Tri Murni PSTW Kasih Sayang Ibu
21	Pekerja Sosial Pelaksana	SMK Ilmu Pekerja Sosial SLTA semua jurusan	8	PSBG Harapan Ibu PSAABR Budi Utama PSTW Sabai Nan Aluih PSAA Tri Murni PSTW Kasih Sayang Ibu PSKW Andam Dewi
22	Pengelola Rehabilitasi	D.III Ilmu Kessos/ ADM	2	PSBG Harapan Ibu

	dan Pelayanan Sosial	Negara/ ADM Perkantoran		PSKW Andam Dewi
23	Pengelola Bimbingan dan Konseling	D.III Bimbingan Konseling/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	1	PSBG Harapan Ibu
24	Pengelola Bimbingan Sosial	D.III Ilmu Kessos/ ADM Negara/ ADM Perkantoran	2	PSBG Harapan Ibu PSKW Andam Dewi
25	Pengelola Asrama	D-III. Ilmu Kesejahteraan Sosial / Administrasi Negara /Administrasi Publik	2	PSBG Harapan Ibu PSTW Kasih Sayang Ibu
26	Pengolah Makanan	D-III. Ilmu Gizi / Tata Boga / Kesehatan Masyarakat	3	PSBG Harapan Ibu PSBN Tuah Sakato PSTW Sabai Nan Aluih
27	Pranata Jamuan	SMK. Tata Boga SLTA. Sederajat / Semua Jurusan	6	PSBG Harapan Ibu PSAABR Budi Utama PSTW Sabai Nan Aluih PSAA Tri Murni PSTW Kasih Sayang Ibu PSKW Andam Dewi
28	Pranata Jasmani dan Mental	D-III. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi /Ilmu Olahraga / Agama Islam / Kesehatan Masyarakat / Bimbingan dan Konseling	1	PSBG Harapan Ibu
29	Pranata Diklat	D-III. Administrasi / Manajemen Pendidikan Psikologi Pendidikan / Sumber Daya Manusia	2	PSBG Harapan Ibu PSBN Tuah Sakato
30	Pekerja Sosial Penyelia	D.III Pekerja Sosial	4	PSBN Tuah Sakato PSAA Tri Murni PSKW Andam Dewi
31	Pekerja Sosial Pemula	SMK Ilmu Pekerja Sosial SLTA semua jurusan	7	PSBN Tuah Sakato PSAABR Budi Utama PSAS Tri Murni PSTW Kasih Sayang Ibu PSKW Andam Dewi

32	Pembina Karakter	S-1. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi / Agama Islam / Psikologi Pendidikan / Bimbingan dan Konseling	1	PSBN Tuah Sakato
33	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	SMK. Ilmu Administrasi / Manajemen Perkantoran SLTA. Sederajat / Semua Jurusan	1	PSBN Tuah Sakato
34	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	SMK. Ilmu Administrasi / Manajemen Perkantoran SLTA. Sederajat / Semua Jurusan	1	PSKW Andam Dewi

**Tabel. 2.3** Rekapitulasi Sarana dan Prasarana (Gedung)

No	Dinas/ UPTD	Sarana	Jumlah Unit
1	2	3	4
1	Dinas Sosial	Gedung Musholla Pos Jaga	6 1 1
2	PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	Ruang Pamer Bengkel elektronik Poliklinik Mosholla Pos Jaga Banungan Rumah Tinggal Bangunan Rumah Dinas Aula Asrama + Wisma Tamu	1 1 1 1 1 3 3 1 6
3	PSBR Harapan Padang Panjang	Ruang Kantor Poliklinik Musholla	1 1 1



		Gedung Pendidikan	3
		Aula dan Dapur	1
		Rumah Dinas	3
		Rumah Petugas	1
		Asrama + Wisma Tamu	6
4	PSAA Tri Murni Padang Panjang	Gedung Kantor	1
		Ruang Belajar	1
		Musholla	1
		Mess	1
		RRT Permanen	2
		RTT Permanen	4
		Asrama	1
5	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	Gedung Kantor	1
		Poliklinik	1
		Musholla	1
		Mesjid	1
		Tempat Wudhu + WC	1
		Aula	2
		Rumah Petugas	2
		Rumah Dinas	1
		Dapur	1
		Asrama + Wisma Tamu	9
6	PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	Poliklinik	1
		Mesjid	1
		Aula	1
		Garase	1
		Dapur	1
		Ruang Keterampilan	1
		Rumah Dinas	1
		Rumah Petugas	1
		Bangunan Isolasi	1
		Gedung Kantor	1

		Asrama+ Wisma Tamu	3
7	PSBG Harapan Ibu Padang	Gedung Kantor Gedung Konsultasi Bangunan Ruang harau Gedung Pendidikan RTT type 45 RTT type 36 RTT Guest House	1 1 1 1 1 1 1
		Asrama Aula	6 1
8	PSBN Tuah Sakato Padang	Gedung kantor Gedung Genset Lapangan Parkir Gudang Poliklinik Tempat Ibadah Ruang Pertemuan Gedung Pendidikan Ruang Pustaka Ruang Pejabat Rumah Negara Gol. III Rumah Negara Gol. II Asrama	1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6
9	PSKW Andam Dewi Solok	Gedung Kantor Poliklinik Musholla Ruang Pendidikan Dapur Ruang Konsultasi Ruang Keterampilan Rumah Dinas Wisma	1 1 1 1 1 1 1 5 3

**Tabel. 2.4** Rekapitulasi Sarana dan Prasarana (Aset Lainnya)

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi	Nilai Perolehan	Keterangan
1	AC	72	Baik	418.361.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
2	Alqurán Digital	9	Baik	22.374.000,00	PSBN Tuah Sakato
3	Alarm	2	Baik	7.000.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
4	Alat digital gula darah + stik	2	Baik	2.000.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
5	Alat Fitnes (Alat Olahraga)	1	Baik	25.278.000,00	8 UPTD
6	Alat Kesehatan	1	Baik	3.500.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
7	Alat pemadam api	17	Baik	11.906.333,32	Dinas dan Delapan UPTD
8	Alat peraga instalasi	1	Baik	3.740.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
9	Alat semprot disinfektan	1	Baik	1.215.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
10	Alat Tennis Meja	1	Baik	8.000.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
11	Alat terapi fisik jogger	2	Baik	10.000.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
12	Lemari Arsip	85	Baik	283.931.060,00	Dinas dan Delapan UPTD
13	Lemari Kayu	476	Baik	912.511.972,92	Dinas dan Delapan UPTD
14	Amplifier	2	Baik	4.362.500,00	Dinas dan Delapan UPTD
15	Antena parabola digital	3	Baik	5.750.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
16	Bus	1	Baik	392.019.570,00	Dinas dan Delapan UPTD

17	Kamera	15	Baik	94.145.064,00	Dinas dan Delapan UPTD
18	CCTV	6	Baik	101.308.400,00	Dinas dan Delapan UPTD
19	Filling Kabinet	44	Baik	102.987.700,00	Dinas dan Delapan UPTD
20	Facsimile	9	Baik	29.582.500,00	Dinas dan Delapan UPTD
21	Frezer Box	9	Baik	24.693.600,00	Dinas dan Delapan UPTD
22	Gas cooker	7	Baik	28.600.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
23	Kasur	46	Baik	51.293.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
24	Karpet	8	Baik	4.800.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
25	Kendaraan Roda4 /Minibus	24	Baik	3.853.465.452,00	Dinas dan Delapan UPTD
26	Kendaraan Roda2 /Sepeda Motor	21	Baik	297.369.926,00	Dinas dan Delapan UPTD
27	Mobil Ambulance	3	Baik	719.860.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
28	Lemari Es	37	Baik	114.991.300,00	Dinas dan Delapan UPTD
29	Handy cam	8	Baik	56.054.625,00	Dinas dan Delapan UPTD
30	Laptop	80	Baik	887.005.836,99	Dinas dan Delapan UPTD
31	Kipas Angin	75	Baik	88.472.800,00	Dinas dan Delapan UPTD
32	Komputer	82	Baik	758.773.500,00	Dinas dan Delapan UPTD
33	Komputer Braille	2	Baik	16.000.000,00	PSBN Tuah

					Sakato
34	Kompore gas	30	Baik	28.456.500,00	Dinas dan Delapan UPTD
35	Lemari makan	18	Baik	47.760.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
36	Lemari obat	3	Baik	747.750,00	Dinas dan Delapan UPTD
37	Lemari Alquran	1	Baik	2.497.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
38	Lemari Tempat Orgen	1	Baik	2.486.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
39	Televisi	89	Baik	262.709.428,57	Dinas dan Delapan UPTD
40	Oven	5	Baik	10.243.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
41	Kursi tamu	69	Baik	365.037.556,00	Dinas dan Delapan UPTD
42	Kursi kerja non struktural	161	Baik	169.884.400,00	Dinas dan Delapan UPTD
43	Kursi Kerja Eselon IV	26	Baik	82.941.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
44	Kursi Kerja Eselon III /Biro/ Direksi	5	Baik	18.641.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
45	Kursi rapat/lipat/susun	354	Baik	159.096.250,00	Dinas dan Delapan UPTD
46	Kursi tunggu	48	Baik	121.086.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
47	Kursi Putar	13	Baik	6.864.300,00	Dinas dan Delapan UPTD
48	Magic com	5	Baik	9.800.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
49	Meja kerja staf	159	Baik	298.419.660,15	Dinas dan Delapan UPTD

50	Meja kerja eselon IV	24	Baik	79.848.412,00	Dinas dan Delapan UPTD
51	Meja kerja eselon III	6	Baik	7.270.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
52	Meja kerja eselon III	1	Baik	4.400.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
53	Mesin absen	10	Baik	73.200.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
54	Mesin Jahit	143	Baik	248.907.794,85	Dinas dan Delapan UPTD
55	Mesin ketik	9	Baik	21.200.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
56	Mesin Ketik Braille	4	Baik	54.886.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
57	Projektor/ Infocus	12	Baik	102.704.011,00	Dinas dan Delapan UPTD
58	Printer	77	Baik	176.278.650,00	Dinas dan Delapan UPTD
59	Printer Braille	1	Baik	89.963.000,00	PSBN Tuah Sakato
60	UPS/Stabilizer	31	Baik	42.662.500,00	Dinas dan Delapan UPTD
61	Vacuum Cleaner	12	Baik	38.117.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
62	Wastafel	42	Baik	93.000.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
63	Wireless	7	Baik	30.450.000,00	Dinas dan Delapan UPTD
	Jumlah barang	2518			

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Provinsi Sumatera Barat dari berbagai

permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relative tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT KONDISI TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS PPKS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Anak Balita Terlantar	196
2	Anak Terlantar	5.861
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	461
4	Anak Jalanan	163
5	Anak Dengan Kedisabilitas	4.874
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	285
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1.131
8	Lanjut Usia Terlantar	46.755
9	Penyandang Disabilitas	19.049
10	Tuna Susila	30
11	Gelandangan	20
12	Pengemis	135
13	Pemulung	233
14	Kelompok Minoritas	2
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	983
16	Orang Dengan HIV/AIDS	472
17	Korban Penyalahgunaan Napza	324
18	Korban Traficking	5
19	Korban Tindak Kekerasan	320
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	12
21	Korban Bencana Alam	24.288
22	Korban Bencana Sosial	590
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	23.481
24	Fakir Miskin	569.805
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	875
26	Komunitas Adat Terpencil	124
	<b>JUMLAH</b>	<b>700.474</b>

Tabel T.-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	Target SPM	IKK (PP)	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Tahun 2019 (Thn n-1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-3)	Tahun 2022 (Thn n-4)	Tahun 2019 (Thn n-1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-3)	Tahun 2022 (Thn n-4)	Tahun 2019 (Thn n-1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-3)	Tahun 2022 (Thn n-4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>A</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam panti</b>															
1	Penyediaan Permakanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100 %	100 %	100 %	-	
2	Penyediaan Sandang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	128 %	-	100 %	100 %	128 %	-	
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	100%		100%	100 %	100%	100%	100%	100%	128 %	-	100 %	100 %	128 %	-	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>B</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti</b>														
1 Penyediaan Permakanan	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
2 Penyediaan Sandang	100%		100 %	100 %	10	0	100 %	100	100	100	-	100 %	100 %	100 %	-
3 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	100%		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	
4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100%		100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
5 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100%		100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
6. Akses Layanan Pengasuhan Keluarga Pengganti	100%		100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>C</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti</b>														
	1. Penyediaan Permakanan	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
	2. Penyediaan Sandang	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-
	3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan Dalam Panti	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
	4. Pemberian Aktivitas Hidup	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100 %	100 %	100 %	-
<b>D</b>	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>														
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	100%		50 org	50 org	336 org	336 org	336 org	50 org	1047org	-	672 %	100%	320 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	100%		50 org	50 org	67 org	61 org	50 org	50 org	67 org	-	100 %	100 %	100 %	-
	3. Peningkatan kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	100%		290 org	290 org	275 org	90 org	290 org	290 org	275 org	-	100 %	100 %	100 %	-
	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%		326 org	326 org	263 org	263 org	326 org	326 org	263 org	-	100 %	100 %	123 %	-
<b>E</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>														
	1. Pengangkatan Anak Antar WNI	100%		25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	-	100 %	100 %	100 %	
	2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota	100%		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100 %	100 %	100 %	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>F</b>	<b>Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>													
	1. Penyediaan Permakanan	100%		1500 org	1500 org	1500 org	100 org	1500 org	1500 org	1500 org	-	100%	100%	100%
	2. Pesikososial	100%		90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	90 org	-	100%	100%	100%

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang melebihi dari target yang telah ditentukan adalah :

1. Penyediaan sandang pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar yang mencapai 128% pada tahun ke-4.
2. Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar mencapai 128% pada tahun ke-4.
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi pada kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi mencapai 320% pada Tahun ke-4.
4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat pada kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi mencapa 123% pada tahun ke-4

**Tabel 2.8 (Tabel T-C.24)**

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,586,908,825	5,412,623,044	5,282,494,196	5,551,162,657		5,282,363,273	5,160,287,750	5,048,320,246	5,290,854,072		94.55	95.34	95.57	95.31		0%	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,989,283,000	2,750,526,334	3,381,311,384	4,731,441,134		4,847,072,867	2,580,885,076	3,258,821,141	4,497,264,192		97.15	93.83	96.38	95.05		-1%	-1%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	151,750,000	159,870,000	151,200,000	192,000,000		146,443,000	143,903,200	122,018,900	160,306,650		96.50	90.01	80.70	83.49		5%	2%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51,326,000	75,360,000	57,266,000	10,132,400		44,509,000	68,578,300	54,359,100	10,112,400		86.72	91.00	94.92	99.80		-28%	-26%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	546,336,400	924,324,110	1,392,223,645	981,943,051	536,272,625	898,324,235	1,349,518,410	950,860,695	98.16	97.19	96.93	96.83	12%	12%
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Dan Aset	527,700,445	-	-	-	495,699,905	-	-	-	93.94	0.00	0.00	0.00	-100%	-100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	198,096,710	217,070,620	293,159,750	3,160,000	165,730,010	202,286,823	235,279,450	3,160,000	83.66	93.19	80.26	100.00	-56%	-55%
Program Pembinaan Anak Terlantar	7,158,605,627	6,668,077,240	6,907,798,435	8,141,573,000	7,085,430,353	6,606,334,232	6,808,100,117	7,582,510,304	98.98	99.07	98.56	93.13	3%	1%
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks	2,933,120,340	2,938,531,175	3,267,522,575	3,349,048,946	2,920,053,788	2,931,695,620	3,206,132,993	3,194,244,890	99.55	99.77	98.12	95.38	3%	2%

Trauma																	
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	2,812,400,836	2,672,534,121	2,760,876,034	3,475,648,156		2,790,310,056	2,668,211,921	2,746,948,462	3,228,838,881	99.21	99.84	99.50	92.90		4%	3%	
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana,PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	951,256,498	879,396,600	904,957,700	1,061,474,756		936,541,032	878,895,724	903,682,156	1,057,386,906	98.45	99.94	99.86	99.61		2%	2%	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,786,927,000	3,569,775,000	10,815,873,972	150,271,500		1,653,818,500	3,301,245,187	9,307,887,224	150,271,500	92.55	92.48	86.06	100.00		-39%	-38%	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5,636,736,091	24,404,887,505	54,095,239,520	37,510,544,900		4,073,206,256	21,181,402,100	49,262,754,163	32,516,129,642	72.26	86.79	91.07	86.69		46%	52%	



lainnya																	
Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	220,326,700	497,293,180	801,444,180	277,619,154		220,021,700	487,192,210	777,432,980	264,129,160	99.86	97.97	97.00	95.14		5%	4%	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	-	-	9,392,123,209	5,663,245,648		-	-	8,858,969,394	5,190,399,400	0	0	94.32	91.65		#NUM!	#NUM!	
Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	159,340,650	168,845,970	287,410,800	-		149,115,650	161,750,250	284,729,605	-	93.58	95.80	99.07	0		-100%	-100%	
JUMLAH	33,710,115,122	51,339,114,899	99,790,901,400	71,099,265,302	-	31,346,588,015	47,270,992,628	92,224,954,341	64,096,468,692	-	92.99	92.08	92.42	90.15	-	-	-

Rasio antara realisasi dan anggaran selama periode 2017-2020 dapat dikatakan baik. Hanya terdapat beberapa program dengan realisasi dibawah 90%. Pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) program yang realisasinya jauh dibawah target yang telah ditentukan yaitu Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya realisasi 72,26%, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial realisasi 83,66 % dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi 86,72 %.

Tahun 2018 hanya 1 (satu) Program yang realisasi di bawah 90 % yaitu Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya sebesar 86,79%, kemudian tahun 2019 terdapat 1 (satu) Program juga yang realisasi dibawah 90% yaitu Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya dengan realisasi 80,26%. Rendahnya serapan anggaran tahun 2017 sampai dengan 2019 pada Program diatas dikarenakan:

- a. Terdapat sisa tender pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya Kegiatan Bimbingan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
- b. Pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar dan Rujukan terhadap Disabilitas realisasi berdasarkan orang yang dipulangkan/ dikembalikan serta yang dirujuk ke panti rujukan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, merupakan kegiatan untuk mengirim ASN dalam pelaksanaan kursus/ bimtek dalam peningkatan kapasitasnya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial**

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini semakin meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Sumatera Barat masih tinggi, ini adalah salah satu dampak gejolak krisis ekonomi global serta peninggalan gempa dahsyat tahun 2009.

Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan

Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah :

#### 2.4.1 Melalui dana APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial pada umumnya menangani permasalahan sosial dalam Panti melalui 8 Panti Pemerintah terhadap 905 kelayan serta 120 panti sosial swasta dengan 4000 kelayan dengan rincian pelayanan sebagai berikut :

- Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang sebanyak : 50 Orang
- Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung sebanyak: 235 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak : 110 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak : 70 Orang
- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang sebanyak : 200 Orang
- Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami sebanyak : 40 Orang
- Panti Sosial Swasta Penyandang Disabilitas Terlantar : 300 Orang
- Panti Sosial Swasta Anak Terlantar : 3.678 Orang
- Panti Sosial Swasta Lanjut Usia Terlantar : 70 Orang

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan rehabilitasi sosial serta bimbingan dan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat belum berjalan sesuai dengan ketentuan dalam penanganan kelayan melalui panti, seperti pelayanan anak terlantar di PSAABR Lubuk Alung dalam memberikan keterampilan otomotif dimana alat yang dipakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, dan juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Begitu juga dengan pemberian pelayanan pada panti swasta dengan jumlah layanan sebanyak 4000 org, belum memenuhi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi seperti :

permakanan, sandang, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (Permensos Nomor 9 tahun 2018).

Kemudian, masalah Virus Corona yang telah menjangkiti seluruh dunia termasuk Indonesia, hal ini sudah menjadi permasalahan global yang harus segera di atasi. Pandemi ini menimbulkan dampak disemua sektor kehidupan seperti Pendidikan, Perekonomian, Kesehatan, Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat maupun lainnya.

Kondisi kesejahteraan sosial disini juga dipertanyakan, apakah akan terpenuhi atau tidak, jika melihat situasi dan kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah. Kondisi kesejahteraan sosial tidak berpola seperti biasa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, bukan perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial masyarakat dan lainnya sebagai dari terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah.

#### 2.4.2 Melalui Dana Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan program/kegiatan melalui Dana Dekonsentrasi di fokuskan kepada pembangunan kesejahteraan sosial melalui satker yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, namun pada tahun 2021 ini Satker 04 (Bidang Rehabilitasi Sosial) tidak mendapatkan pagu anggaran dari Kementerian Sosial sementara penanganan yang dilakukan oleh Bidang tersebut sangatlah menyentuh terhadap kesejahteraan sosial seperti: Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA/HIV dan AIDS.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan mempunyai inovasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang wajib diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2021-2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021-2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-

nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

Permasalahan Dinas Sosial diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B-35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kemiskinan	Besaran permasalahan PPKS semakin kompleks ditambah dengan pandemi Covid-19	Keterbatasan kapasitas sarana, anggaran, SDM dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM
		Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS	Terbatasnya daya jangkau Dinas Sosial dalam memberdayakan PSKS

		Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan	Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, kegotongroyongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan
2	Sarana dan Prasarana	Terbatasnya Sarana prasarana dan rehabilitasi panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti	Anggaran yang diperoleh OPD dalam rangka Perbaikan sarana prasaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi melalui panti sosial masih terbatas

### 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL  
DAN BERKELANJUTAN”**

**Sumatera Barat Madani** adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamis yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

**Sumatera Barat Unggul** adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di

tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta Pariwisata di Sumatera Barat.

**Sumatera Barat Berkelanjutan** adalah pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- d. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
- e. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- g. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.



Untuk pencapaian visi dan misi tersebut ditandai dengan 4 (empat) Program Unggulan Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Sumbar Sehat dan Cerdas.
2. Sumbar Religius dan Berbudaya.
3. Sumbar Sejahtera.
4. Sumbar Berkeadilan.

Tahapan pembangunan jangka panjang 2005-2025 Sumatera Barat Barat dibagi ke dalam 4(empat) tahapan, yaitu:

- Tahapan 2005-2010 : Mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh, Bersih dalam Semangat Kebersamaan.
- Tahapan 2011-2015 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan dan jasa.
- Tahapan 2016-2020 : Perwujudan pemanfaatan tanah ulayat sesuai dengan potensi ekonomi ataupun potensi sosial.
- Tahapan 2021–2025 : Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu Gerbang Pantai Barat Sumatera, maka prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Barat tahun 2021-2025 merupakan tahap ketiga dari RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sumatera Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Barat, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

***" MENJADI PROVINSI TERKEMUKA BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMAIS  
PADA TAHUN 2025"***

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah Misi ke-1 yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.”**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan seperti terlihat pada tabel T.IV.11 berikut:

Tabel T-IV.C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi:</b>				
<b>TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi Gubernur Nomor 1 :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Adapun permasalahan dalam pelayanan SKPD adalah :  1 . Kebijakan dalam penanganan PPKS belum maksimal  2. Stikmasi masyarakat terhadap penanganan Eks. Penyakit Sosial  3. Jangkauan Pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PPKS	Faktor Penghambat adalah :  1.Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial  2.Sarana dan Prasarana belum memadai	Faktor Pendorong adalah :  1. Partisipasi masyarakat dalam penanganan PPKS dalam panti  2. Kesukarelaan masyarakat dalam Penanganan PPKS

### 3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015.

**Visi Kementerian Sosial adalah:**

*“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Tujuan dan Sarana Kementerian Sosial pada tahun Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 3.1** Tujuan dan Sasaran K/L

No	Tujuan K/L	Sasaran OPD	Faktor Pengungkit OPD	Faktor Pendorong OPD
1	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Partisipasi Sosial</li> <li>2. Persentase Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi sertifikasi (ASN-Non ASN)</li> <li>3. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi</li> <li>4. Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah PSKS perorangan, Lembaga</li> <li>2. Jumlah SDM Kesos (ASN-Non ASN)</li> <li>3. Jumlah LKS Kesejahteraan Sosial</li> <li>4. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan terpadu penanggulangan kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah PSKS perorangan, Lembaga yang berpartisipasi aktif</li> <li>2. Jumlah SDM Kesos (ASN-Non ASN) yang terakreditasi</li> <li>3. Jumlah LKS Kesos yang terakreditasi</li> <li>4. Persentase Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan</li> </ol>
3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektifitas	Nilai Reformasi Birokrasi	Peningkatan Nilai SAKIP dari tahun ke tahun.	Memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk SAKIP

birokrasi dan pelibatan publik			
-----------------------------------	--	--	--

Adapun program prioritas pada masa Renstra 2020-2024 Kementerian Sosial RI dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2** Program dan Sasaran Program K/L

No	Program K/L	Sasaran Program K/L	Program OPD	Sasaran OPD
1	Perlindungan Sosial	1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan  2. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengendalian Terpadu Penanggulangan Kemiskinan  4. Meningkatnya Keberfungsian Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	1. Rehabilitasi Sosial  2. Perlindungan dan Jaminan Sosial  3. Pemberdayaan Sosial  4. Penanganan Bencana  5. Pengelolaan Taman makam Pahlawan	a. Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar PPKS dalam panti  b. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam panti  c. Meningkatkan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial  d. Meningkatkan peran aktif dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial  e. Terpenuhinya pengelolaan kelembagaan sosial yang modern dan

		<p>5. Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin, Kelompok rentan dan Masyarakat Rawan Bencana dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesiapsiagaan Bencana melalui Perindungan Sosial Adiptif</p> <p>6. Meningkatnya kemandirian pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</p> <p>7. Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya system informasi layanan terpadu</p>		<p>akuntabel</p> <p>f. Meningkatkan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dan Kepahlawanan di Masyarakat</p> <p>g. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan dan PPKS lainnya</p> <p>h. Meningkatkan kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lengkap, akurat dan tepat waktu</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>kesejahteraan sosial yang handal</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas SDM dan kualitas Lembaga dibidang kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### **Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bukittinggi**

Jumlah PPKS Kota Bukittinggi berdasarkan Updating data PPKS meningkat pada tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019. Pada tahun 2020 telah dilakukan verifikasi data penduduk miskin. Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi dari capaian hasil program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang mulai dilaksanakan Tahun 2021 – 2026.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial disimpulkan menjadi poin- poin antara lain:

- a. Masih relatif tingginya angka kemiskinan Kota Bukittinggi yang telah menjadi permasalahan sosial di tingkat daerah hingga nasional.
- b. Penanganan permasalahan kemiskinan yang masih bersifat parsial, belum ada koordinasi lintas perangkat daerah untuk saling bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Database kemiskinan yang tidak akurat karena masing-masing instansi terkait (BPS, Kementerian Sosial RI) mempunyai database penduduk miskin sendiri-sendiri.
- d. Relatif rendahnya dukungan anggaran daerah untuk penanganan kemiskinan khususnya untuk Dinas Sosial.

- e. Belum optimalnya penyerapan bantuan stimulan pusat untuk daerah pada program nasional penanggulangan kemiskinan.
- f. Belum maksimalnya bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.
- g. Maraknya pengiriman penderita psikotik terlantar yang dikirim ke Kota Bukittinggi sehingga pemerintah kota terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penderita psikotik terlantar kiriman luar daerah.
- h. Belum terdatanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara akurat (*By Name By Addres*) menggunakan aplikasi sistem informasi.
- i. Belum terpenuhinya kesamaan hak penyandang disabilitas.
- j. Rendahnya tingkat partisipasi perangkat daerah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- k. Minimnya dukungan anggaran operasional untuk TKSK, PSM, Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra Dinas Sosial dan penanganan PPKS.

### **Rencana Strategis Kabupaten Pasaman**

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Pasaman sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar dari berbagai aspek pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah merupakan dua aspek yang berkorelasi erat terhadap timbulnya persoalan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Kabupaten Pasaman, pada dasarnya permasalahan dari tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial diakibatkan karena belum terpadunya penanganan PPKS oleh SKPD – SKPD yang terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, Peraturan Bupati Pasaman no 34 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah dibidang Sosial. Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan, antara lain:



1. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang penanganannya menuntut pendekatan multisektor, lintas fungsi serta koordinasi yang sinergis antar berbagai pihak atau *stakeholder* yang terkait.
2. Masih banyaknya masalah kesejahteraan sebagai dampak kemiskinan terhadap timbulnya masalah kesejahteraan sosial ikutannya.
3. meningkatnya jumlah anak terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga yang bertempat tinggal dirumah tidak layak huni, dan wanita yang mengalami rawan sosial ekonomi, dsb.
4. Belum memadainya prasarana dan sarana, sumber dana dan fasilitas yang diperlukan oleh Organisasi sosial yang menjadi mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial
5. SDM yang terbatas, baik kualitas maupun kuantitas.
6. Kurangnya pemahaman Pegawai tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi sebagai berikut:

- Penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota
- Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan- ketentuan lain yang bersifat nonspasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

#### **3.4.2. Telahaan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Strategis**

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat, kebencanaan adalah hal yang tidak dapat dianggap enteng. Sumatera Barat merupakan provinsi yang rawan terhadap bencana alam geologi, seperti gempa bumi tektonik dan tsunami, letusan gunung api aktif, tanah longsor dan banjir bandang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat seperti melakukan identifikasi daerah rawan bencana geologi, evaluasi potensi dan meningkatkan kewaspadaan melalui Pendidikan sejak dini.

Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan tujuan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adapun komitmen TPB tersebut mencakup 17 tujuan diantaranya:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);

2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupanyang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
7. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
8. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh);
9. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal. Adapun Isu-Isu

Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas sebagai berikut :

**Tabel. 3.3 ISU-ISU STRATEGIS**

<b>KELOMPOK SASARAN</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>
KEMISKINAN	- Masih Tingginya Penduduk Miskin dan Rentan dengan Status Kesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi
KETELANTARAN	- Masih banyaknya jumlah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga
KEDISABILITASAN	- Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
KORBAN BENCANA	- Tingginya resiko bencana alam dan non alam (Bencana Sosial) akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan seperti banjir, longsor, puting beliung, gelombang pasang dan konflik sosial (Non Alam).
TUNA SOSIAL	- Banyaknya permasalahan sosial tuna susila
POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kompetensi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Rendahnya kapasitas dan terbatasnya potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Belum optimalnya peran dunia usaha dalam pengumpulan sumbangan dana sosial</li> </ul>

### 3.5.1 Kemiskinan

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/ keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya

berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

### **3.5.2 Keterlantaran**

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

### **3.5.3 Kedisabilitas**

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kedisabilitas telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

#### **3.5.4 Korban Bencana**

Sumatera Barat secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana bukan alam frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Ada kecenderungan menurun frekuensi dari segala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Tetapi penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

#### **3.5.5 Tuna Sosial**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal.

#### **3.5.6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat untuk menjaga, menciptakan, mendukung, penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat diperlukan untuk ikut serta penanggulangan permasalahan sosial.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih .

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial**

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, adalah :

- a. Meningkatnya Kemandirian PPKS, dengan Indikator Kinerja :
  - Persentase PPKS yang mandiri
- b. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan Indikator Kinerja :
  - Nilai Akuntabilitas Kinerja
  - Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat selama masa periode RPJMD (2021-2026), adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS, dengan Indikator Kinerja :
  - Persentase PPKS yang mandiri
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
  - Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
  - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T.C-25

## Tujuan/ Sasaran/ Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal 2021	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	1. Persentase PPKS yang mandiri			-	-	59%	60%	65%	70%
			1. Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	-	-	59%	60%	65%	70%
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB	BB
			1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	BB (70,01)	BB (70,04)	BB (71,50)	BB (73,25)	BB (75,40)
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			-	B	B	B	B	B



			1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	B (80,00)	B (80,00)	B (84,00)	B (85,05)	B (85,50)
--	--	--	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

#### 4.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk melihat keterkaitan hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Sosial dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1**

No	RPJMD 2021-2026		RENSTRA 2021-2026	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
	MISI 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing			
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Kemandirian PPKS	1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
		2. Menurunnya prevalansi stunting	2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan		
		4. Meningkatnya daya saing masyarakat		

Untuk menyusun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan Analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja sebagai berikut:

1. Analisis *Logical Frame Work*, dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* Internal bersama Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Analisis *Cascadedown* dan Pohon Kinerja.

Kerangka analisis Analisis *Logical Frame Work*, menganalisis untuk menghasilkan indikator kinerja Dinas Sosial yang dipadukan dengan Pohon Kinerja yang merujuk kepada karakteristik Dinas Sosial sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Sosial. Hasil dari analisis tersebut menghasilkan (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan Indikator yang harus dicapai oleh Dinas Sosial sebagai OPD urusan wajib yang meliputi Indikator untuk eselon II, III dan IV, seperti dibahas pada Bab Selanjutnya.

Tabel 5-1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan			
Misi 1: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kemandirian PPKS	1. Meningkatnya Kemandirian PPKS	1. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti 4. Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
		2. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	5. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan dan PPKS lainnya. 6. Peningkatan kualitas layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan tepat waktu dan menciptakan system informasi layanan DTKS yang handal 7. Peningkatan kemandirian masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan social adiktif

		3. Meningkatkan Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	8. Peningkatan kapasitas SDM Kessos, peran dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial, kelembagaan sosial yang modern dan peningkatan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Kepahlawananan di tengah masyarakat
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Yang baik 2. Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	9. Meningkatkan kinerja ASN 10. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat. 11. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1. Meningkatkan Pelayanan Internal Organisasi dibidang layanan umum, layanan aset, dan layanan kepegawaian.	12. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan Organisasi

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada Bab IV dan V telah dijelaskan strategi dan kebijakan maupun program-program yang akan dilaksanakan serta sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan lebih rinci mengenai indikator atau target pencapaian dari masing-masing sasaran setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari program pembangunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, fokus program pembangunan hingga tahun 2026 adalah:

- a. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam panti.
- b. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- c. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dalam rencana strategis Dinas Sosial telah ditetapkan Program Strategis yang selaras dengan pencapaian kinerja sebagai SKPD urusan wajib sosial di Sumatera Barat, program tersebut yaitu:

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ❖ Program Pemberdayaan Sosial
- ❖ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- ❖ Program Rehabilitasi Sosial
- ❖ Program Perlindungan dan jaminan Sosial
- ❖ Program Penanganan Bencana
- ❖ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 5 tahun kedepan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra		Lokasi
							Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1.06.01.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS SOSIAL)	Persentase realisasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	11,530,200	100%	12,683,220	100%	13,951,542	100%	15,346,696	100%	16,881,366	100%	18,569,502	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2			1.06.01.1.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS SOSIAL)		100%	100%	19,000,050	100%	20,900,055	100%	22,990,061	100%	25,289,067	100%	27,817,973	100%	30,599,771	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3			1.06.01.1.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS SOSIAL)		100%	100%	171,996,300	100%	189,195,930	100%	208,115,523	100%	228,927,075	100%	251,819,783	100%	277,001,761	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4			1.06.01.1.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS SOSIAL)		100%	100%	153,63 9,900	100%	169,00 3,890	100%	185,90 4,279	100%	204,49 4,707	100%	224,94 4,178	100%	247,43 8,595	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5			1.06.01.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS SOSIAL)		100%	100%	35,324, 100	100%	38,856, 510	100%	42,742, 161	100%	47,016, 377	100%	51,718, 015	100%	56,889, 816	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6			1.06.01.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS SOSIAL)		100%	100%	19,739, 213,28 8	100%	21,713, 134,61 7	100%	23,884, 448,07 8	100%	26,272, 892,88 6	100%	28,900, 182,17 5	100%	31,790, 200,39 2	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DINAS SOSIAL)		100%	100%	393,73 9,700	100%	433,11 3,670	100%	476,42 5,037	100%	524,06 7,541	100%	576,47 4,295	100%	634,12 1,724	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	74,880, 000	100%	82,368, 000	100%	90,604, 800	100%	99,665, 280	100%	109,63 1,808	100%	120,59 4,989	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	70,560,000	100%	77,616,000	100%	85,377,600	100%	93,915,360	100%	103,306,896	100%	113,637,586	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
10			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	70,560,000	100%	77,616,000	100%	85,377,600	100%	93,915,360	100%	103,306,896	100%	113,637,586	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
11			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	64,320,000	100%	70,752,000	100%	77,827,200	100%	85,609,920	100%	94,170,912	100%	103,588,003	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
12			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	61,680,000	100%	67,848,000	100%	74,632,800	100%	82,096,080	100%	90,305,688	100%	99,336,257	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	70,560,000	100%	77,616,000	100%	85,377,600	100%	93,915,360	100%	103,306,896	100%	113,637,586	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
14			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	61,680,000	100%	67,848,000	100%	74,632,800	100%	82,096,080	100%	90,305,688	100%	99,336,257	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15			1.06.01.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	61,680,000	100%	67,848,000	100%	74,632,800	100%	82,096,080	100%	90,305,688	100%	99,336,257	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
16			1.06.01.1.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS SOSIAL)		100%	100%	21,436,945	100%	23,580,640	100%	25,938,703	100%	28,532,574	100%	31,385,831	100%	34,524,414	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
17			1.06.01.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS SOSIAL)		100%	100%	21,637,802	100%	23,801,582	100%	26,181,740	100%	28,799,914	100%	31,679,906	100%	34,847,896	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS SOSIAL)		100%	100%	71,250,000	100%	78,375,000	100%	86,212,500	100%	94,833,750	100%	104,317,125	100%	114,748,838	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
19			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	12,750,000	100%	14,025,000	100%	15,427,500	100%	16,970,250	100%	18,667,275	100%	20,534,003	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
20			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	8,250,000	100%	9,075,000	100%	9,982,500	100%	10,980,750	100%	12,078,825	100%	13,286,708	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
21			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	9,000,000	100%	9,900,000	100%	10,890,000	100%	11,979,000	100%	13,176,900	100%	14,494,590	
22			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	10,500,000	100%	11,550,000	100%	12,705,000	100%	13,975,500	100%	15,373,050	100%	16,910,355	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsung, Sicincin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	11,250,000	100%	12,375,000	100%	13,612,500	100%	14,973,750	100%	16,471,125	100%	18,118,238	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
24			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	8,250,000	100%	9,075,000	100%	9,982,500	100%	10,980,750	100%	12,078,825	100%	13,286,708	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
25			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	14,250,000	100%	15,675,000	100%	17,242,500	100%	18,966,750	100%	20,863,425	100%	22,949,768	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
26			1.06.01.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	8,250,000	100%	9,075,000	100%	9,982,500	100%	10,980,750	100%	12,078,825	100%	13,286,708	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
27			1.06.01.1.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DINAS SOSIAL)		100%	100%	33,324,800	100%	36,657,280	100%	40,323,008	100%	44,355,309	100%	48,790,840	100%	53,669,924	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28			1.06.01.1.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (DINAS SOSIAL)		100%	100%	50,202,432	100%	55,222,675	100%	60,744,943	100%	66,819,437	100%	73,501,381	100%	80,851,519	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
29			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS SOSIAL)		100%	100%	24,214,000	100%	26,635,400	100%	29,298,940	100%	32,228,834	100%	35,451,717	100%	38,996,889	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
30			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	13,930,500	100%	15,323,550	100%	16,855,905	100%	18,541,496	100%	20,395,645	100%	22,435,210	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
31			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	13,181,500	100%	14,499,650	100%	15,949,615	100%	17,544,577	100%	19,299,034	100%	21,228,938	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	15,040,870	100%	16,544,957	100%	18,199,453	100%	20,019,398	100%	22,021,338	100%	24,223,472	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
33			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	19,830,400	100%	21,813,440	100%	23,994,784	100%	26,394,262	100%	29,033,689	100%	31,937,058	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingskung, Sicincin
34			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	7,275,000	100%	8,002,500	100%	8,802,750	100%	9,683,025	100%	10,651,328	100%	11,716,460	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	8,870,200	100%	9,757,220	100%	10,732,942	100%	11,806,236	100%	12,986,860	100%	14,285,546	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
36			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	4,835,800	100%	5,319,380	100%	5,851,318	100%	6,436,450	100%	7,080,095	100%	7,788,104	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
37			1.06.01.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	6,868,191	100%	7,555,010	100%	8,310,511	100%	9,141,562	100%	10,055,718	100%	11,061,290	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
38			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS SOSIAL)		100%	100%	56,405,000	100%	62,045,500	100%	68,250,050	100%	75,075,055	100%	82,582,561	100%	90,840,817	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

39			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	24,577,900	100%	27,035,690	100%	29,739,259	100%	32,713,185	100%	35,984,503	100%	39,582,954	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
40			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	120,073,440	100%	132,080,784	100%	145,288,862	100%	159,817,749	100%	175,799,524	100%	193,379,476	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
41			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	26,540,800	100%	29,194,880	100%	32,114,368	100%	35,325,805	100%	38,858,385	100%	42,744,224	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
42			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	2,300,000	100%	2,530,000	100%	2,783,000	100%	3,061,300	100%	3,367,430	100%	3,704,173	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
43			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	1,500,000	100%	1,650,000	100%	1,815,000	100%	1,996,500	100%	2,196,150	100%	2,415,765	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak



44			1.06.01.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	53,020,000	100%	58,322,000	100%	64,154,200	100%	70,569,620	100%	77,626,582	100%	85,389,240	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
45			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	24,096,000	100%	26,505,600	100%	29,156,160	100%	32,071,776	100%	35,278,954	100%	38,806,849	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
46			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	46,441,900	100%	51,086,090	100%	56,194,699	100%	61,814,169	100%	67,995,586	100%	74,795,144	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
47			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	116,937,248	100%	128,630,973	100%	141,494,070	100%	155,643,477	100%	171,207,825	100%	188,328,607	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
48			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	34,529,500	100%	37,982,450	100%	41,780,695	100%	45,958,765	100%	50,554,641	100%	55,610,105	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin

49			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	47,640,800	100%	52,404,880	100%	57,645,368	100%	63,409,905	100%	69,750,895	100%	76,725,985	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
50			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	15,786,728	100%	17,365,401	100%	19,101,941	100%	21,012,135	100%	23,113,348	100%	25,424,683	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
51			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	24,826,850	100%	27,309,535	100%	30,040,489	100%	33,044,537	100%	36,348,991	100%	39,983,890	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
52			1.06.01.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	6,060,000	100%	6,666,000	100%	7,332,600	100%	8,065,860	100%	8,872,446	100%	9,759,691	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
53			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS SOSIAL)		100%	100%	113,380,400	100%	124,718,440	100%	137,190,284	100%	150,909,312	100%	166,000,244	100%	182,600,268	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
54			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	84,313,950	100%	92,745,345	100%	102,019,880	100%	112,221,867	100%	123,444,054	100%	135,788,460	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan

55			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	56,486,100	100%	62,134,710	100%	68,348,181	100%	75,182,999	100%	82,701,299	100%	90,971,429	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
56			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	58,124,730	100%	63,937,203	100%	70,330,923	100%	77,364,016	100%	85,100,417	100%	93,610,459	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
57			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	70,419,200	100%	77,461,120	100%	85,207,232	100%	93,727,955	100%	103,100,751	100%	113,410,826	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuung, Sicincin
58			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	57,973,400	100%	63,770,740	100%	70,147,814	100%	77,162,595	100%	84,878,855	100%	93,366,740	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
59			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	60,651,800	100%	66,716,980	100%	73,388,678	100%	80,727,546	100%	88,800,300	100%	97,680,330	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
60			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah		100%	100%	58,192,900	100%	64,012,190	100%	70,413,409	100%	77,454,750	100%	85,200,225	100%	93,720,247	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

				Sakato" Padang)															
61			1.06.01.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	100%	100%	46,565,600	100%	51,222,160	100%	56,344,376	100%	61,978,814	100%	68,176,695	100%	74,994,364		Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
62			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS SOSIAL)	100%	100%	8,606,800	100%	9,467,480	100%	10,414,228	100%	11,455,651	100%	12,601,216	100%	13,861,337		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
63			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)	100%	100%	8,100,000	100%	8,910,000	100%	9,801,000	100%	10,781,100	100%	11,859,210	100%	13,045,131		Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
64			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)	100%	100%	5,980,586	100%	6,578,645	100%	7,236,509	100%	7,960,160	100%	8,756,176	100%	9,631,794		Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
65			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri	100%	100%	2,876,000	100%	3,163,600	100%	3,479,960	100%	3,827,956	100%	4,210,752	100%	4,631,827		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

				Murni" Padang Panjang)															
66			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	7,400,000	100%	8,140,000	100%	8,954,000	100%	9,849,400	100%	10,834,340	100%	11,917,774	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
67			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	4,471,000	100%	4,918,100	100%	5,409,910	100%	5,950,901	100%	6,545,991	100%	7,200,590	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
68			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	4,026,000	100%	4,428,600	100%	4,871,460	100%	5,358,606	100%	5,894,467	100%	6,483,913	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
69			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	7,889,000	100%	8,677,900	100%	9,545,690	100%	10,500,259	100%	11,550,285	100%	12,705,313	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

70			1.06.01.1.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW))		100%	100%	5,184,000	100%	5,702,400	100%	6,272,640	100%	6,899,904	100%	7,589,894	100%	8,348,884	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
71			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	35,220,000	100%	38,742,000	100%	42,616,200	100%	46,877,820	100%	51,565,602	100%	56,722,162	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
72			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	3,480,000	100%	3,828,000	100%	4,210,800	100%	4,631,880	100%	5,095,068	100%	5,604,575	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
73			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	2,160,000	100%	2,376,000	100%	2,613,600	100%	2,874,960	100%	3,162,456	100%	3,478,702	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
74			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	1,440,000	100%	1,584,000	100%	1,742,400	100%	1,916,640	100%	2,108,304	100%	2,319,134	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	3,000,000	100%	3,300,000	100%	3,630,000	100%	3,993,000	100%	4,392,300	100%	4,831,530	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Semua Kelurahan
76			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	3,000,000	100%	3,300,000	100%	3,630,000	100%	3,993,000	100%	4,392,300	100%	4,831,530	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
77			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	3,000,000	100%	3,300,000	100%	3,630,000	100%	3,993,000	100%	4,392,300	100%	4,831,530	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
78			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	3,075,000	100%	3,382,500	100%	3,720,750	100%	4,092,825	100%	4,502,108	100%	4,952,318	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79			1.06.01.1.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	1,500,000	100%	1,650,000	100%	1,815,000	100%	1,996,500	100%	2,196,150	100%	2,415,765	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
80			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS SOSIAL)		100%	100%	179,237,000	100%	197,160,700	100%	216,876,770	100%	238,564,447	100%	262,420,892	100%	288,662,981	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
81			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	10,360,000	100%	11,396,000	100%	12,535,600	100%	13,789,160	100%	15,168,076	100%	16,684,884	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
82			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	40,638,000	100%	44,701,800	100%	49,171,980	100%	54,089,178	100%	59,498,096	100%	65,447,905	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	32,490, 000	100%	35,739, 000	100%	39,312, 900	100%	43,244, 190	100%	47,568, 609	100%	52,325, 470	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
84			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	14,453, 000	100%	15,898, 300	100%	17,488, 130	100%	19,236, 943	100%	21,160, 637	100%	23,276, 701	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin
85			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	16,895, 000	100%	18,584, 500	100%	20,442, 950	100%	22,487, 245	100%	24,735, 970	100%	27,209, 566	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
86			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	19,407, 600	100%	21,348, 360	100%	23,483, 196	100%	25,831, 516	100%	28,414, 667	100%	31,256, 134	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	9,276,8 50	100%	10,204, 535	100%	11,224, 989	100%	12,347, 487	100%	13,582, 236	100%	14,940, 460	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
88			1.06.01.1.06.9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	24,004, 000	100%	26,404, 400	100%	29,044, 840	100%	31,949, 324	100%	35,144, 256	100%	38,658, 682	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
89			1.06.01.1.07.5	Pengadaan Mebel (DINAS SOSIAL)		100%	100%	112,65 6,100	100%	123,92 1,710	100%	136,31 3,881	100%	149,94 5,269	100%	164,93 9,796	100%	181,43 3,776	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
90			1.06.01.1.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS SOSIAL)		100%	100%	165,57 6,620	100%	182,13 4,282	100%	200,34 7,710	100%	220,38 2,481	100%	242,42 0,729	100%	266,66 2,802	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
91			1.06.01.1.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	19,506, 600	100%	21,457, 260	100%	23,602, 986	100%	25,963, 285	100%	28,559, 613	100%	31,415, 574	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS SOSIAL)		100%	100%	8,971,250	100%	9,868,375	100%	10,855,213	100%	11,940,734	100%	13,134,807	100%	14,448,288	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
93			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	2,242,000	100%	2,466,200	100%	2,712,820	100%	2,984,102	100%	3,282,512	100%	3,610,763	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
94			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	2,206,500	100%	2,427,150	100%	2,669,865	100%	2,936,852	100%	3,230,537	100%	3,553,590	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
95			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	1,053,600	100%	1,158,960	100%	1,274,856	100%	1,402,342	100%	1,542,576	100%	1,696,833	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
96			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	9,723,000	100%	10,695,300	100%	11,764,830	100%	12,941,313	100%	14,235,444	100%	15,658,989	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
97			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	1,000,000	100%	1,100,000	100%	1,210,000	100%	1,331,000	100%	1,464,100	100%	1,610,510	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	1,785,000	100%	1,963,500	100%	2,159,850	100%	2,375,835	100%	2,613,419	100%	2,874,760	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
99			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	1,000,000	100%	1,100,000	100%	1,210,000	100%	1,331,000	100%	1,464,100	100%	1,610,510	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
100			1.06.01.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	3,936,300	100%	4,329,930	100%	4,762,923	100%	5,239,215	100%	5,763,137	100%	6,339,451	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
101			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS SOSIAL)		100%	100%	184,920,000	100%	203,412,000	100%	223,753,200	100%	246,128,520	100%	270,741,372	100%	297,815,509	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
102			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	83,820,000	100%	92,202,000	100%	101,422,200	100%	111,564,420	100%	122,720,862	100%	134,992,948	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	87,990,000	100%	96,789,000	100%	106,467,900	100%	117,114,690	100%	128,826,159	100%	141,708,775	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
104			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	157,710,000	100%	173,481,000	100%	190,829,100	100%	209,912,010	100%	230,903,211	100%	253,993,532	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
105			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	75,181,530	100%	82,699,683	100%	90,969,651	100%	100,066,616	100%	110,073,278	100%	121,080,606	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
106			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	67,150,000	100%	73,865,000	100%	81,251,500	100%	89,376,650	100%	98,314,315	100%	108,145,747	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	83,970,000	100%	92,367,000	100%	101,603,700	100%	111,764,070	100%	122,940,477	100%	135,234,525	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
108			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	64,665,500	100%	71,132,050	100%	78,245,255	100%	86,069,781	100%	94,676,759	100%	104,144,434	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
109			1.06.01.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	43,318,800	100%	47,650,680	100%	52,415,748	100%	57,657,323	100%	63,423,055	100%	69,765,361	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
110			1.06.01.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS SOSIAL)		100%	100%	25,360,000	100%	27,896,000	100%	30,685,600	100%	33,754,160	100%	37,129,576	100%	40,842,534	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
111			1.06.01.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	1,200,000	100%	1,320,000	100%	1,452,000	100%	1,597,200	100%	1,756,920	100%	1,932,612	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112			1.06.01.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	1,920,000	100%	2,112,000	100%	2,323,200	100%	2,555,520	100%	2,811,072	100%	3,092,179	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
113			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS SOSIAL)		100%	100%	1,045,741,342	100%	1,150,315,476	100%	1,265,347,024	100%	1,391,881,726	100%	1,531,069,899	100%	1,684,176,889	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
114			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	371,051,500	100%	408,156,650	100%	448,972,315	100%	493,869,547	100%	543,256,501	100%	597,582,151	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
115			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	403,550,550	100%	443,905,605	100%	488,296,166	100%	537,125,782	100%	590,838,360	100%	649,922,196	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
116			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	284,559,900	100%	313,015,890	100%	344,317,479	100%	378,749,227	100%	416,624,150	100%	458,286,565	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	356,48 2,000	100%	392,13 0,200	100%	431,34 3,220	100%	474,47 7,542	100%	521,92 5,296	100%	574,11 7,826	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
118			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	406,14 4,050	100%	446,75 8,455	100%	491,43 4,301	100%	540,57 7,731	100%	594,63 5,504	100%	654,09 9,054	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
119			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	332,91 5,850	100%	366,20 7,435	100%	402,82 8,179	100%	443,11 0,996	100%	487,42 2,096	100%	536,16 4,306	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
120			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	273,83 9,534	100%	301,22 3,487	100%	331,34 5,836	100%	364,48 0,420	100%	400,92 8,462	100%	441,02 1,308	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
121			1.06.01.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	213,59 1,248	100%	234,95 0,373	100%	258,44 5,410	100%	284,28 9,951	100%	312,71 8,946	100%	343,99 0,841	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122			1.06.01.1.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	49,986,250	100%	54,984,875	100%	60,483,363	100%	66,531,699	100%	73,184,869	100%	80,503,355	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
123			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	216,285,500	100%	237,914,050	100%	261,705,455	100%	287,876,001	100%	316,663,601	100%	348,329,961	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
124			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	23,244,500	100%	25,568,950	100%	28,125,845	100%	30,938,430	100%	34,032,272	100%	37,435,500	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	21,944,750	100%	24,139,225	100%	26,553,148	100%	29,208,462	100%	32,129,308	100%	35,342,239	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
126			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	15,550,000	100%	17,105,000	100%	18,815,500	100%	20,697,050	100%	22,766,755	100%	25,043,431	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
127			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	45,660,000	100%	50,226,000	100%	55,248,600	100%	60,773,460	100%	66,850,806	100%	73,535,887	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	36,602,500	100%	40,262,750	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
129			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	25,669,850	100%	28,236,835	100%	31,060,519	100%	34,166,570	100%	37,583,227	100%	41,341,550	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
130			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	20,505,000	100%	22,555,500	100%	24,811,050	100%	27,292,155	100%	30,021,371	100%	33,023,508	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131			1.06.01.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	12,200,000	100%	13,420,000	100%	14,762,000	100%	16,238,200	100%	17,862,020	100%	19,648,222	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
132			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS SOSIAL)		100%	100%	19,474,000	100%	21,421,400	100%	23,563,540	100%	25,919,894	100%	28,511,883	100%	31,363,072	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
133			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	12,750,000	100%	14,025,000	100%	15,427,500	100%	16,970,250	100%	18,667,275	100%	20,534,003	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
134			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	3,500,000	100%	3,850,000	100%	4,235,000	100%	4,658,500	100%	5,124,350	100%	5,636,785	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	8,992,000	100%	9,891,200	100%	10,880,320	100%	11,968,352	100%	13,165,187	100%	14,481,706	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
136			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	206,991,730	100%	227,690,903	100%	250,459,993	100%	275,505,993	100%	303,056,592	100%	333,362,251	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
137			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	4,999,350	100%	5,499,285	100%	6,049,214	100%	6,654,135	100%	7,319,548	100%	8,051,503	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
138			1.06.01.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	108,608,297	100%	119,469,127	100%	131,416,039	100%	144,557,643	100%	159,013,408	100%	174,914,748	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139			1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	14,300,000	100%	15,730,000	100%	17,303,000	100%	19,033,300	100%	20,936,630	100%	23,030,293	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
140			1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	17,960,000	100%	19,756,000	100%	21,731,600	100%	23,904,760	100%	26,295,236	100%	28,924,760	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
141			1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	8,052,550	100%	8,857,805	100%	9,743,586	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
142			1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS SOSIAL)		100%	100%	43,120,000	100%	47,432,000	100%	52,175,200	100%	57,392,720	100%	63,131,992	100%	69,445,191	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143			1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	6,230,000	100%	6,853,000	100%	7,538,300	100%	8,292,130	100%	9,121,343	100%	10,033,477	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
144			1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	3,730,000	100%	4,103,000	100%	4,513,300	100%	4,964,630	100%	5,461,093	100%	6,007,202	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
145			1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	11,310,000	100%	12,441,000	100%	13,685,100	100%	15,053,610	100%	16,558,971	100%	18,214,868	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146			1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	14,078,100	100%	15,485,910	100%	17,034,501	100%	18,737,951	100%	20,611,746	100%	22,672,921	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
147			1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	13,450,000	100%	14,795,000	100%	16,274,500	100%	17,901,950	100%	19,692,145	100%	21,661,360	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
148	Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	1.06.02	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berperan aktif	100%	100%	2,987,822,472	100%	3,286,604,719	100%	3,615,265,191	100%	3,976,791,710	100%	4,374,470,881	100%	4,811,917,969	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
149			1.06.02.1.02.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (DINAS SOSIAL)		100%	100%	656,779,800	100%	722,457,780	100%	794,703,558	100%	874,173,914	100%	961,591,305	100%	1,057,750,436	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150			1.06.02.1.02.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi (DINAS SOSIAL)		100%	100%	492,840,600	100%	542,124,660	100%	596,337,126	100%	655,970,839	100%	721,567,922	100%	793,724,715	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
151			1.06.02.1.02.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (DINAS SOSIAL)		100%	100%	1,838,202,072	100%	2,022,022,279	100%	2,224,224,507	100%	2,446,646,958	100%	2,691,311,654	100%	2,960,442,819	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
152		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1.06.04	Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	22,407,094,002	100%	24,647,803,402	100%	27,112,583,742	100%	29,823,842,117	100%	32,806,226,328	100%	36,086,848,961	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Kab. Pesisir

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153			1.06.04.1.01.1	Penyediaan Permakanaan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	416,40 2,850	100%	458,04 3,135	100%	503,84 7,449	100%	554,23 2,193	100%	609,65 5,413	100%	670,62 0,954	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir
154			1.06.04.1.01.1	Penyediaan Permakanaan (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	1,283,2 00,000	100%	1,411,5 20,000	100%	1,552,6 72,000	100%	1,707,9 39,200	100%	1,878,7 33,120	100%	2,066,6 06,432	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
155			1.06.04.1.01.1	Penyediaan Permakanaan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	645,10 0,000	100%	709,61 0,000	100%	780,57 1,000	100%	858,62 8,100	100%	944,49 0,910	100%	1,038,9 40,001	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156			1.06.04.1.01.2	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	238,82 3,880	100%	262,70 6,268	100%	288,97 6,895	100%	317,87 4,584	100%	349,66 2,043	100%	384,62 8,247	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
157			1.06.04.1.01.2	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	187,90 5,251	100%	206,69 5,776	100%	227,36 5,354	100%	250,10 1,889	100%	275,11 2,078	100%	302,62 3,286	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
158			1.06.04.1.01.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (DINAS SOSIAL)		100%	100%	247,72 0,000	100%	272,49 2,000	100%	299,74 1,200	100%	329,71 5,320	100%	362,68 6,852	100%	398,95 5,537	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
159			1.06.04.1.01.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	10,069, 930	100%	11,076, 923	100%	12,184, 615	100%	13,403, 077	100%	14,743, 385	100%	16,217, 723	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
160			1.06.04.1.01.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	6,400,8 00	100%	7,040,8 80	100%	7,744,9 68	100%	8,519,4 65	100%	9,371,4 11	100%	10,308, 552	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
161			1.06.04.1.01.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (DINAS SOSIAL)		100%	100%	91,357, 100	100%	100,49 2,810	100%	110,54 2,091	100%	121,59 6,300	100%	133,75 5,930	100%	147,13 1,523	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162			1.06.04.1.01.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)		100%	100%	426,09 3,741	100%	468,70 3,115	100%	515,57 3,427	100%	567,13 0,769	100%	623,84 3,846	100%	686,22 8,231	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
163			1.06.04.1.01.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)		100%	100%	562,13 8,261	100%	618,35 2,087	100%	680,18 7,296	100%	748,20 6,025	100%	823,02 6,628	100%	905,32 9,291	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk
164			1.06.04.1.01.1 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (DINAS SOSIAL)		100%	100%	500,00 0,000	100%	550,00 0,000	100%	605,00 0,000	100%	665,50 0,000	100%	732,05 0,000	100%	805,25 5,000	
165			1.06.04.1.02.2	Penyediaan Makanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	4,257,0 02,176	100%	4,682,7 02,394	100%	5,150,9 72,633	100%	5,666,0 69,896	100%	6,232,6 76,886	100%	6,855,9 44,574	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
166			1.06.04.1.02.2	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	1,817,8 25,000	100%	1,999,6 07,500	100%	2,199,5 68,250	100%	2,419,5 25,075	100%	2,661,4 77,583	100%	2,927,6 25,341	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167			1.06.04.1.02.2	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	1,283,200,000	100%	1,411,520,000	100%	1,552,672,000	100%	1,707,939,200	100%	1,878,733,120	100%	2,066,606,432	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
168			1.06.04.1.02.2	Penyediaan Makanan (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	1,283,200,000	100%	1,411,520,000	100%	1,552,672,000	100%	1,707,939,200	100%	1,878,733,120	100%	2,066,606,432	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
169			1.06.04.1.02.3	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	211,645,250	100%	232,809,775	100%	256,090,753	100%	281,699,828	100%	309,869,811	100%	340,856,792	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
170			1.06.04.1.02.3	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	293,401,850	100%	322,742,035	100%	355,016,239	100%	390,517,862	100%	429,569,649	100%	472,526,613	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
171			1.06.04.1.02.3	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	179,905,000	100%	197,895,500	100%	217,685,050	100%	239,453,555	100%	263,398,911	100%	289,738,802	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172			1.06.04.1.02.4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (DINAS SOSIAL)		100%	100%	850,000,000	100%	935,000,000	100%	1,028,500,000	100%	1,131,350,000	100%	1,244,485,000	100%	1,368,933,500	
173			1.06.04.1.02.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	7,376,000	100%	8,113,600	100%	8,924,960	100%	9,817,456	100%	10,799,202	100%	11,879,122	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
174			1.06.04.1.02.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	3,911,430	100%	4,302,573	100%	4,732,830	100%	5,206,113	100%	5,726,725	100%	6,299,397	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
175			1.06.04.1.02.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	13,354,200	100%	14,689,620	100%	16,158,582	100%	17,774,440	100%	19,551,884	100%	21,507,073	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
176			1.06.04.1.02.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	599,261,500	100%	659,187,650	100%	725,106,415	100%	797,617,057	100%	877,378,762	100%	965,116,638	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177			1.06.04.1.02.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	708,82 9,676	100%	779,71 2,644	100%	857,68 3,908	100%	943,45 2,299	100%	1,037,7 97,529	100%	1,141,5 77,281	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
178			1.06.04.1.02.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	574,42 9,750	100%	631,87 2,725	100%	695,05 9,998	100%	764,56 5,997	100%	841,02 2,597	100%	925,12 4,857	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
179			1.06.04.1.02.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	758,87 7,478	100%	834,76 5,226	100%	918,24 1,748	100%	1,010,0 65,923	100%	1,111,0 72,516	100%	1,222,1 79,767	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
180			1.06.04.1.02.9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (DINAS SOSIAL)		100%	100%	400,00 0,000	100%	440,00 0,000	100%	484,00 0,000	100%	532,40 0,000	100%	585,64 0,000	100%	644,20 4,000	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181			1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	15,132,800	100%	16,646,080	100%	18,310,688	100%	20,141,757	100%	22,155,932	100%	24,371,526	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan
182			1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	9,405,500	100%	10,346,050	100%	11,380,655	100%	12,518,721	100%	13,770,593	100%	15,147,652	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
183			1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)		100%	100%	36,046,100	100%	39,650,710	100%	43,615,781	100%	47,977,359	100%	52,775,095	100%	58,052,605	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
184			1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)		100%	100%	28,800,000	100%	31,680,000	100%	34,848,000	100%	38,332,800	100%	42,166,080	100%	46,382,688	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Semua Kelurahan



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185			1.06.04.1.02.1 2	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)		100%	100%	16,800,000	100%	18,480,000	100%	20,328,000	100%	22,360,800	100%	24,596,880	100%	27,056,568	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah
186			1.06.04.1.03.1	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	50,519,300	100%	55,571,230	100%	61,128,353	100%	67,241,188	100%	73,965,307	100%	81,361,838	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
187			1.06.04.1.03.1	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	1,410,950,000	100%	1,552,045,000	100%	1,707,249,500	100%	1,877,974,450	100%	2,065,771,895	100%	2,272,349,085	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
188			1.06.04.1.03.1	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	898,850,000	100%	988,735,000	100%	1,087,608,500	100%	1,196,369,350	100%	1,316,006,285	100%	1,447,606,914	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
189			1.06.04.1.03.2	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	303,837,600	100%	334,221,360	100%	367,643,496	100%	404,407,846	100%	444,848,630	100%	489,333,493	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190			1.06.04.1.03.2	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	151,48 9,460	100%	166,63 8,406	100%	183,30 2,247	100%	201,63 2,471	100%	221,79 5,718	100%	243,97 5,290	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
191			1.06.04.1.03.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	20,285, 000	100%	22,313, 500	100%	24,544, 850	100%	26,999, 335	100%	29,699, 269	100%	32,669, 195	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
192			1.06.04.1.03.5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	11,013, 016	100%	12,114, 318	100%	13,325, 749	100%	14,658, 324	100%	16,124, 157	100%	17,736, 572	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
193			1.06.04.1.03.6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	181,60 8,285	100%	199,76 9,114	100%	219,74 6,025	100%	241,72 0,627	100%	265,89 2,690	100%	292,48 1,959	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194			1.06.04.1.03.7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	323,94 9,382	100%	356,34 4,320	100%	391,97 8,752	100%	431,17 6,627	100%	474,29 4,290	100%	521,72 3,719	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
195			1.06.04.1.03.1 2	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin)		100%	100%	32,500, 000	100%	35,750, 000	100%	39,325, 000	100%	43,257, 500	100%	47,583, 250	100%	52,341, 575	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingsuang, Sicincin
196			1.06.04.1.03.1 2	Pemulasaraan (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)		100%	100%	15,400, 000	100%	16,940, 000	100%	18,634, 000	100%	20,497, 400	100%	22,547, 140	100%	24,801, 854	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak
197			1.06.04.1.05.1	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	585,23 1,356	100%	643,75 4,492	100%	708,12 9,941	100%	778,94 2,935	100%	856,83 7,228	100%	942,52 0,951	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
198			1.06.04.1.05.2	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	116,84 9,080	100%	128,53 3,988	100%	141,38 7,387	100%	155,52 6,125	100%	171,07 8,738	100%	188,18 6,612	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
199			1.06.04.1.05.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	12,065, 000	100%	13,271, 500	100%	14,598, 650	100%	16,058, 515	100%	17,664, 367	100%	19,430, 803	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200			1.06.04.1.05.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)		100%	100%	328,93 1,000	100%	361,82 4,100	100%	398,00 6,510	100%	437,80 7,161	100%	481,58 7,877	100%	529,74 6,665	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk
201		Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	809,15 0,960	100%	890,06 6,056	100%	979,07 2,662	100%	1,076,9 79,928	100%	1,184,6 77,921	100%	1,303,1 45,713	
202			1.06.05.1.01.1	Pengangkatan Anak antar WNI (DINAS SOSIAL)		100%	100%	51,061, 000	100%	56,167, 100	100%	61,783, 810	100%	67,962, 191	100%	74,758, 410	100%	82,234, 251	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
203			1.06.05.1.02.2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL)		100%	100%	758,08 9,960	100%	833,89 8,956	100%	917,28 8,852	100%	1,009,0 17,737	100%	1,109,9 19,510	100%	1,220,9 11,461	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
204		Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.06	Penanganan Bencana	Jumlah PPKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	862,78 9,800	100%	949,06 8,780	100%	1,043,9 75,658	100%	1,148,3 73,224	100%	1,263,2 10,546	100%	1,389,5 31,601	
205			1.06.06.1.01.1	Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	215,49 9,600	100%	237,04 9,560	100%	260,75 4,516	100%	286,82 9,968	100%	315,51 2,964	100%	347,06 4,261	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206			1.06.06.1.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL)		100%	100%	433,75 0,400	100%	477,12 5,440	100%	524,83 7,984	100%	577,32 1,782	100%	635,05 3,961	100%	698,55 9,357	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
207			1.06.06.1.01.5	Pelayanan Dukungan Psikososial (DINAS SOSIAL)		100%	100%	213,53 9,800	100%	234,89 3,780	100%	258,38 3,158	100%	284,22 1,474	100%	312,64 3,621	100%	343,90 7,983	
208		Meningkatkan Partisipasi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	1.06.07	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif	100%	100%	118,28 0,450	100%	130,10 8,495	100%	143,11 9,345	100%	157,43 1,279	100%	173,17 4,407	100%	190,49 1,848	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
209			1.06.07.1.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (DINAS SOSIAL)		100%	100%	118,28 0,450	100%	130,10 8,495	100%	143,11 9,345	100%	157,43 1,279	100%	173,17 4,407	100%	190,49 1,848	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

### **7.1. Program Berdasarkan RPJMD Daerah**

#### **7.1.1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas.

Sasaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin
- b. Pengangkatan Anak antar WNI

#### **7.1.2. Program Pemberdayaan Sosial**

Program Pemberdayaan Sosial ini terdiri atas

- a. Permbdayaan Pekerja Sosial Masyarakat
- b. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- c. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Keluarga

#### **7.1.3 Program Rehabilitasi Sosial**

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi sasaran pelayanan adalah

- a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat ( yang memerlukan perlindungan khusus)
- b. Penyandang Disabilitas (anak maupun dewasa)

- c. Tuna Sosial
- d. Lanjut Usia Terlantar
- e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

#### 7.1.4. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan membantu Korban Bencana baik yang diakibatkan Bencana Alam maupun Bencana Sosial serta Penanganan Kelompok Rentan berupa Bantuan Sosial dan penguatan terhadap masyarakat kelompok rentan. Program tersebut meliputi bantuan, rapat koordinasi, pemeliharaan sarana dan prasarana bencana.

### 7.2. **Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang tergambar pada tabel T.C.28

Tabel T-C.28

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PPKS yang mandiri	59%	-	59%	60%	65%	70%	70%
2	Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Organisasi	BB	BB	BB	BB	A	A	A



Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2021 – 2026) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2021 – 2026 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Menyosong periode lima tahun ke depan ( 2021 – 2026 ) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial. Melalui rencana strategis Dinas Sosial Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih terukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Sumatera Barat 2005 – 2025, RPJMD Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin

kompleks. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Provinsi, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan.